



LAPORAN TAHUNAN FITRA RIAU 2025

PERIODE JANUARI–DESEMBER 2025

Kata Pengantar Badan Pengurus

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan dukungan berbagai pihak, FITRA Riau dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas kerja riset, advokasi kebijakan, dan penguatan kelembagaan yang telah dijalankan sepanjang Januari–Desember 2025.

Tahun 2025 merupakan periode yang penuh tantangan bagi kerja-kerja masyarakat sipil di tingkat daerah. Dinamika politik lokal, keterbatasan ruang partisipasi publik, serta kompleksitas persoalan tata kelola anggaran dan pembangunan berkelanjutan menuntut organisasi seperti FITRA Riau untuk terus beradaptasi, menjaga integritas, dan memperkuat kualitas advokasi. Dalam konteks tersebut, FITRA Riau berupaya konsisten menjalankan mandat sebagai lembaga riset dan advokasi yang independen, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan publik.

Laporan tahunan ini tidak hanya mencatat capaian program dan kegiatan, tetapi juga merefleksikan proses transformasi kelembagaan yang dijalankan FITRA Riau sepanjang tahun 2025. Penguatan tata kelola internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi riset, kampanye publik, dan advokasi kebijakan menjadi pondasi penting dalam menjaga keberlanjutan dan kredibilitas organisasi. Kami menyadari bahwa perubahan kebijakan tidak selalu terjadi secara cepat dan linear, namun kerja advokasi yang konsisten telah berkontribusi pada meningkatnya kesadaran publik dan terbukanya ruang dialog kebijakan yang lebih konstruktif di Provinsi Riau.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tim FITRA Riau, dewan pengawas, mitra masyarakat sipil, media, akademisi, komunitas warga, serta para donor dan mitra yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan. Dukungan tersebut menjadi energi penting bagi FITRA Riau untuk terus bekerja di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan.

Ke depan, FITRA Riau berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas riset dan advokasi, menjaga independensi organisasi, serta memperluas dampak kerja demi terwujudnya tata kelola anggaran dan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada keadilan sosial. Semoga laporan tahunan ini dapat menjadi rujukan, bahan refleksi bersama, sekaligus pemantik kolaborasi yang lebih luas dalam mendorong perubahan kebijakan di Provinsi Riau.

Pekanbaru, 23 Desember 2025

Koordinator FITRA Riau

Tarmidzi

Kata Pengantar Dewan Pengawas

Laporan Tahunan FITRA Riau Tahun 2025 merupakan dokumen penting yang mencerminkan perjalanan organisasi dalam menjalankan mandat pengawasan anggaran dan advokasi kebijakan publik di tingkat daerah. Dari perspektif Dewan Pengawas, laporan ini menunjukkan upaya sungguh-sungguh FITRA Riau dalam menjaga akuntabilitas, integritas, dan konsistensi nilai dalam setiap proses kerja organisasi.

Sepanjang tahun 2025, FITRA Riau dihadapkan pada berbagai tantangan, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Dinamika kebijakan daerah yang kompleks, resistensi terhadap keterbukaan, serta keterbatasan sumber daya menjadi ujian bagi ketahanan dan profesionalisme organisasi. Dalam kondisi tersebut, Dewan Pengawas menilai bahwa FITRA Riau mampu menjaga arah kerja organisasi agar tetap selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai dasar yang menjadi pijakan lembaga.

Laporan ini juga memperlihatkan langkah-langkah transformasi kelembagaan yang penting, khususnya dalam penguatan tata kelola internal, pembaruan kebijakan dan SOP, serta pengembangan budaya kerja dan etika organisasi. Dewan Pengawas memandang upaya tersebut sebagai prasyarat utama bagi keberlanjutan kerja advokasi dan peningkatan kepercayaan publik terhadap FITRA Riau sebagai organisasi masyarakat sipil yang kredibel.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Dewan Pengawas mendorong agar capaian dan pembelajaran tahun 2025 dijadikan dasar untuk memperkuat perencanaan strategis ke depan. Tantangan yang masih dihadapi perlu disikapi dengan strategi yang lebih terfokus, kolaboratif, dan berjangka menengah, tanpa mengurangi independensi dan sikap kritis organisasi.

Dewan Pengawas menyampaikan apresiasi kepada Koordinator dan seluruh tim FITRA Riau atas dedikasi, integritas, dan komitmen yang ditunjukkan sepanjang tahun 2025. Kami juga mengapresiasi dukungan para mitra dan pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam memperkuat peran FITRA Riau di Provinsi Riau.

Akhir kata, Dewan Pengawas berharap Laporan Tahunan FITRA Riau 2025 ini dapat menjadi sarana akuntabilitas publik, refleksi internal, serta landasan yang kuat bagi langkah-langkah strategis organisasi di tahun-tahun mendatang.

Pekanbaru, 23 Desember 2025

Ketua Dewan Pengawas FITRA Riau

Woro Supartinah

EKSEKUTIF SUMMARY

Tahun 2025 merupakan periode penting bagi FITRA Riau dalam memperkuat peran sebagai organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada riset dan advokasi kebijakan tata kelola anggaran publik di Provinsi Riau. Di tengah dinamika politik daerah, keterbatasan fiskal, serta tantangan transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik, FITRA Riau menjalankan dua agenda utama: transformasi kelembagaan dan penguatan riset–advokasi kebijakan.

Konteks dan Tantangan

Sepanjang 2025, Provinsi Riau menghadapi tekanan serius pada pengelolaan keuangan daerah, ditandai dengan penurunan kapasitas fiskal, risiko defisit APBD, lemahnya komitmen anggaran untuk ketahanan bencana dan kelompok rentan, serta masih tingginya praktik kebijakan yang minim transparansi. Ruang partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan cenderung menyempit, sementara tuntutan akuntabilitas publik semakin meningkat.

Dalam konteks tersebut, FITRA Riau memposisikan diri sebagai aktor pengawas independen yang berbasis data, sekaligus mitra kritis dalam mendorong perbaikan kebijakan publik.

Agenda Transformasi Kelembagaan

Pada tahun 2025, FITRA Riau menjalankan agenda transformasi kelembagaan sebagai fondasi keberlanjutan organisasi. Transformasi ini mencakup penguatan tata kelola internal melalui pembaruan kebijakan dan SOP (keuangan, staf, konflik kepentingan, GEDSI, dan SEAH), peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi, serta penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih tertib dan kolektif.

Pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan tematik, mentoring internal, dan pembelajaran organisasi yang terintegrasi dengan kerja riset dan advokasi. Budaya kerja FITRA Riau ditegaskan pada nilai integritas, kemandirian, akuntabilitas, keberpihakan pada kelompok rentan, dan kerja kolektif. Penguatan jejaring strategis dengan masyarakat sipil, media, akademisi, pemerintah daerah, DPRD, dan donor menjadi bagian penting dalam menjaga legitimasi dan daya dorong advokasi.

Agenda Riset dan Advokasi Kebijakan

Kerja riset dan advokasi FITRA Riau tahun 2025 difokuskan pada isu-isu strategis, antara lain:

- Transparansi dan akuntabilitas APBD dan legislasi daerah;
- Pencegahan korupsi dan penguatan keterbukaan informasi publik;
- Kebijakan anggaran berkelanjutan, ketahanan bencana, dan transisi energi;
- Pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan;
- Perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan, khususnya perempuan dan penyandang disabilitas.

Pendekatan yang digunakan mengintegrasikan riset berbasis bukti, kampanye publik, dan advokasi kebijakan. Hasil kajian diterjemahkan ke dalam policy brief, infografis, rilis media, diskusi publik, dan dialog kebijakan dengan pemerintah daerah dan DPRD.

Dampak dan Perubahan

Sepanjang 2025, kerja FITRA Riau berkontribusi pada meningkatnya kesadaran publik terhadap isu anggaran dan kebijakan publik. Diskursus mengenai APBD, belanja prioritas, ketahanan bencana, dan risiko korupsi semakin mengemuka di ruang publik dan media. Kajian FITRA Riau menjadi rujukan bagi masyarakat sipil, media, dan komunitas warga dalam mengawal kebijakan daerah.

Cerita perubahan juga terlihat dari mulai terbukanya respons pemerintah daerah terhadap kritik berbasis data, penguatan praktik kolaborasi dengan masyarakat sipil, serta menguatnya jejaring advokasi lintas isu dan wilayah di Riau, meskipun perubahan kebijakan struktural masih berlangsung secara bertahap.

Akuntabilitas Program dan Keuangan

Sepanjang Januari–Desember 2025, FITRA Riau melaksanakan berbagai program riset, advokasi, dan penguatan kapasitas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Total dukungan anggaran dari mitra dan donor pada tahun 2025 sebesar Rp 2,94 miliar, yang dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan lengkap disajikan sebagai bagian dari laporan ini.

Pembelajaran dan Arah Ke Depan

Pembelajaran utama tahun 2025 menegaskan bahwa dampak advokasi kebijakan membutuhkan pondasi kelembagaan yang kuat, konsistensi kerja berbasis data, serta jejaring yang luas. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan pendanaan jangka panjang, tingginya beban kerja advokasi, dan dinamika politik yang mempengaruhi ruang partisipasi publik.

Memasuki tahun 2026, FITRA Riau menetapkan arah strategis untuk memperkuat keberlanjutan organisasi, meningkatkan kualitas riset dan advokasi, memperluas partisipasi publik, serta mendorong kebijakan anggaran yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan komitmen tersebut, FITRA Riau menegaskan perannya sebagai aktor masyarakat sipil yang kredibel, independen, dan berorientasi pada dampak jangka menengah dan panjang bagi tata kelola pemerintahan di Provinsi Riau.

DAFTAR ISI

Ringkasan Awal

- Kata Pengantar Badan Pengurus
- Kata Pengantar Dewan Pengawas
- Ringkasan Eksekutif

BAB I | PROFIL FITRA RIAU

- Profil Fitra Riau
- Konteks dan Peran Fitra Riau

BAB II | TRANSFORMASI KELEMBAGAAN

- Arah Transformasi Organisasi
- Penguatan Tata Kelola & SOP
- Pengembangan SDM & Budaya Kerja

BAB III | RISET & ADVOKASI KEBIJAKAN

- Isu Prioritas Advokasi
- Pendekatan Riset & Kampanye Publik
- Dampak Advokasi & Cerita Perubahan

BAB IV | AKUNTABILITAS PROGRAM & KEUANGAN

- Ikhtisar Program 2025
- Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran
- Dukungan Donor & Mitra

BAB V | PEMBELAJARAN & ARAH KE DEPAN

- Refleksi Organisasi 2025
- Tantangan Utama
- Arah Strategis 2026

BAB VI | PENUTUP

- Kesimpulan Umum
- Komitmen FITRA Riau ke Depan

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Profil FITRA Riau

Perkumpulan FITRA Riau adalah organisasi masyarakat sipil (NGO) yang berbasis di Provinsi Riau, Indonesia. Didirikan pada tahun 2004 dan secara resmi terdaftar sebagai perkumpulan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada tahun 2012, dengan pembaruan legalitas terakhir AHU-0001429.AH.01.08/2025.

FITRA Riau berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan otonomi dan desentralisasi di Indonesia, sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat miskin serta kelompok rentan. Selain itu, FITRA Riau memberdayakan masyarakat agar mampu memainkan peran signifikan dalam memastikan tata kelola anggaran publik yang adil, efektif, dan berdampak pada kesejahteraan.

Pendekatan Kerja

FITRA Riau menggunakan dua pendekatan utama: 1) Watchdog – melakukan pemantauan, analisis, dan kritik terhadap kebijakan publik. 2) Engagement – membangun dialog, kolaborasi, dan kemitraan dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya.

Fokus Isu Strategis

FITRA Riau memfokuskan kerja advokasinya pada tiga topik utama:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Anggaran Publik**
 - Mendorong penguatan sistem layanan informasi publik melalui peningkatan kapasitas, asistensi teknis, serta monitoring dan evaluasi.
 - Memberdayakan komunitas sebagai penerima manfaat dari keterbukaan informasi.
 - Bekerja sama dengan Komisi Informasi Publik (KIP) Riau untuk mempercepat implementasi kebijakan keterbukaan informasi di tingkat daerah.
2. **Kebijakan Anggaran Daerah yang Proporsional dan Pro-Poor**
 - Memastikan APBD/APBN sebagai instrumen strategis dikelola secara proporsional, efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin serta kelompok terpinggirkan.
 - Mendorong inovasi kebijakan anggaran daerah melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah.
3. **Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Layanan Publik**
 - Memfasilitasi pemantauan dan pencegahan kasus korupsi berbasis masyarakat.
 - Mendorong pelembagaan mekanisme pencegahan korupsi dengan pendekatan audit sosial.

Capaian Kerja

Sejak berdiri, FITRA Riau telah bekerja di 10 kabupaten dan 2 kota di seluruh Provinsi Riau. Upaya advokasinya berkontribusi terhadap kebijakan publik baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Strategi advokasi FITRA Riau berfokus pada penguatan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola anggaran publik di semua level pemerintahan.

Kelompok Penerima Manfaat

FITRA Riau menjalin kerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat, termasuk: Kelompok Perempuan, Kelompok disabilitas, Komunitas adat, dan Masyarakat rentan di sekitar kawasan hutan dan wilayah pesisir.

1.2. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik Riau Tahun 2025

Tahun 2025 ditandai dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks di Provinsi Riau maupun di tingkat kabupaten/kota. Sebagai daerah yang kaya sumber daya alam, khususnya minyak dan gas, kehutanan, dan perkebunan, Riau menghadapi paradoks pembangunan: kontribusi besar terhadap perekonomian nasional tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik di daerah.

Secara sosial, ketimpangan akses terhadap pelayanan dasar masih menjadi persoalan, terutama di wilayah kabupaten dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana, konflik lahan, dan degradasi lingkungan. Kelompok rentan—termasuk masyarakat miskin, perempuan, dan komunitas terdampak pembangunan—masih menghadapi keterbatasan ruang partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat lokal.

Dari sisi ekonomi dan fiskal daerah, kapasitas APBD provinsi dan kabupaten/kota di Riau menghadapi tekanan signifikan. Ketergantungan pada dana transfer pusat, fluktuasi pendapatan daerah, serta keterbatasan ruang fiskal membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan yang berkelanjutan. Di beberapa daerah, prioritas belanja belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan mendesak masyarakat, seperti penguatan ketahanan bencana, perlindungan sosial, dan pemulihan lingkungan.

Secara politik, dinamika hubungan antara eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memengaruhi proses perencanaan dan penganggaran. Proses pengambilan keputusan kebijakan publik masih cenderung elitis, dengan keterlibatan publik yang terbatas dan akses informasi yang belum sepenuhnya terbuka. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya akuntabilitas dan lemahnya pengawasan publik terhadap kebijakan anggaran daerah.

1.3 Tantangan Tata Kelola dan Pembangunan Berkelanjutan

Tantangan utama tata kelola anggaran di Riau terletak pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kebijakan. Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, masih ditemukan kesenjangan antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan realisasi belanja. Alokasi anggaran untuk sektor-sektor strategis seperti lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan perlindungan kelompok rentan relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan dan tingkat risiko yang dihadapi daerah.

Selain itu, risiko korupsi dan inefisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah tetap menjadi persoalan serius. Minimnya keterbukaan data anggaran dan lemahnya mekanisme pengawasan publik membuat masyarakat sulit mengawal penggunaan APBD secara efektif. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, tantangan ini diperparah oleh tekanan eksploitasi sumber daya alam yang belum sepenuhnya diimbangi dengan kebijakan fiskal yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan.

Di tingkat kabupaten/kota, kapasitas teknis pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran juga bervariasi. Hal ini berdampak pada kualitas kebijakan dan implementasi program pembangunan, serta memperlebar ketimpangan antarwilayah di Provinsi Riau.

1.4. Mandat dan Peran FITRA Riau

Dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik tersebut, FITRA Riau menjalankan mandat sebagai organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada riset dan advokasi kebijakan tata kelola anggaran publik. Peran FITRA Riau tidak hanya sebagai pengawas anggaran, tetapi juga sebagai penyedia analisis kebijakan berbasis data dan jembatan antara kepentingan masyarakat dengan proses pengambilan keputusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

FITRA Riau berperan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas APBD melalui pemantauan kebijakan anggaran, penguatan kapasitas masyarakat dan jejaring sipil, serta diseminasi informasi publik yang mudah diakses. Melalui kerja riset dan advokasi, FITRA Riau berupaya memastikan bahwa kebijakan anggaran daerah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, berpihak pada kelompok rentan, dan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, FITRA Riau memposisikan diri sebagai aktor independen yang menjaga jarak kritis terhadap kekuasaan, sekaligus membuka ruang dialog kebijakan yang konstruktif dengan pemerintah daerah dan DPRD. Dalam konteks kabupaten/kota, peran FITRA Riau menjadi penting untuk memperkuat pengawasan publik di wilayah-wilayah dengan kapasitas pengawasan yang masih terbatas.

Dengan mandat tersebut, FITRA Riau menegaskan komitmen untuk terus berkontribusi dalam memperbaiki kualitas tata kelola anggaran dan kebijakan publik di Provinsi Riau, sebagai prasyarat bagi terwujudnya pembangunan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

BAB II

AGENDA TRANSFORMASI KELEMBAGAAN

Agenda transformasi kelembagaan FITRA Riau pada tahun 2025 dirancang sebagai respons atas tantangan nyata yang dihadapi organisasi masyarakat sipil di Provinsi Riau, khususnya menyempitnya ruang partisipasi publik, kompleksitas tata kelola anggaran daerah, serta meningkatnya kebutuhan terhadap organisasi advokasi yang kredibel, adaptif, dan berkelanjutan. Transformasi ini tidak hanya dimaknai sebagai pembenahan internal, tetapi sebagai upaya strategis untuk memastikan FITRA Riau tetap relevan, dipercaya publik, dan mampu menjalankan mandat advokasi secara efektif.

2.1. Arah Transformasi Kelembagaan FITRA Riau 2025

- **Kerangka Transformasi Organisasi**



Kerangka transformasi organisasi FITRA Riau pada tahun 2025 disusun sebagai respons strategis terhadap perubahan konteks sosial-politik di Provinsi Riau, meningkatnya kompleksitas isu tata kelola anggaran, serta tantangan keberlanjutan organisasi masyarakat sipil. Transformasi ini dirancang secara bertahap dan realistis, dengan menempatkan kapasitas internal organisasi sebagai titik tolak utama.

Kerangka transformasi FITRA Riau bertumpu pada empat dimensi kunci. Pertama, penguatan kelembagaan dan tata kelola internal, yang mencakup pembenahan struktur kerja, kejelasan peran dan fungsi, serta mekanisme pengambilan keputusan yang lebih tertib dan akuntabel. Kedua,

penguatan kapasitas sumber daya manusia, melalui pembagian peran yang lebih fungsional antara riset, advokasi, dan komunikasi publik, serta pengembangan budaya kerja yang kolaboratif dan berbasis pembelajaran.

Ketiga, penguatan sistem pendukung organisasi, terutama pada aspek manajemen keuangan, dokumentasi pengetahuan, dan pengelolaan data riset-advokasi. Sistem ini dipandang penting untuk menjaga konsistensi kualitas kerja dan memori kelembagaan di tengah keterbatasan sumber daya. Keempat, penguatan jejaring strategis dan legitimasi publik, dengan memperluas kolaborasi bersama masyarakat sipil, media, akademisi, dan komunitas warga, tanpa mengurangi independensi dan posisi kritis FITRA Riau terhadap kebijakan publik.

Melalui kerangka ini, transformasi kelembagaan tidak dipahami sebagai perubahan struktural semata, tetapi sebagai proses berkelanjutan untuk memastikan FITRA Riau tetap adaptif, kredibel, dan relevan dalam mendorong perubahan kebijakan di tingkat daerah.

- **Keterkaitan dengan Visi Jangka Menengah FITRA Riau**

Arah transformasi kelembagaan FITRA Riau 2025 memiliki keterkaitan langsung dengan visi jangka menengah organisasi, yaitu memperkuat peran FITRA Riau sebagai lembaga riset–advokasi yang berpengaruh dalam mendorong tata kelola anggaran daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada keadilan sosial serta pembangunan berkelanjutan.

Transformasi kelembagaan diposisikan sebagai prasyarat strategis untuk mencapai visi tersebut. Penguatan tata kelola internal dan sistem kerja yang profesional memungkinkan FITRA Riau menghasilkan riset yang lebih kredibel dan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti. Sementara itu, pengembangan kapasitas tim dan jejaring memperkuat daya jangkauan advokasi, baik dalam mempengaruhi pengambil kebijakan maupun dalam membangun kesadaran publik.

Dalam kerangka visi jangka menengah, FITRA Riau juga menempatkan transformasi sebagai upaya menjaga independensi dan integritas organisasi di tengah dinamika politik daerah yang sering kali tidak kondusif bagi kerja-kerja pengawasan anggaran. Dengan fondasi kelembagaan yang lebih kuat, FITRA Riau diharapkan mampu menjalankan peran sebagai penyeimbang kekuasaan secara konsisten, kritis, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa agenda advokasi organisasi tetap selaras dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Riau.

2.2. Penguatan Tata Kelola Internal

Penguatan tata kelola internal menjadi agenda prioritas dalam transformasi kelembagaan FITRA Riau tahun 2025, sebagai respons atas tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi serta kompleksitas pengelolaan organisasi advokasi di tengah dinamika sosial-politik Riau. Tata kelola internal yang kuat dipandang sebagai fondasi utama untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan keberlanjutan kerja FITRA Riau.

- **Pembaruan Kebijakan Internal dan SOP**

Sepanjang tahun 2025, FITRA Riau melakukan peninjauan dan pembaruan terhadap sejumlah kebijakan internal dan Standar Operasional Prosedur (SOP) guna menyesuaikan praktik kerja organisasi dengan kebutuhan aktual serta standar organisasi masyarakat sipil yang kredibel. Pembaruan ini diarahkan untuk memastikan kepatuhan, efisiensi, dan perlindungan terhadap seluruh unsur organisasi.

Beberapa SOP kunci yang diperbaiki dan diperkuat meliputi:

1. *SOP Pengelolaan Keuangan*, yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, pemisahan fungsi, serta dokumentasi yang tertib dalam setiap tahapan perencanaan, penggunaan, dan pelaporan anggaran organisasi.
2. *SOP Staf/Pegawai*, yang mengatur hubungan kerja, pembagian peran dan tanggung jawab, etika kerja, serta mekanisme evaluasi kinerja secara adil dan proporsional.
3. *SOP Conflict of Interest (COI)*, sebagai instrumen pencegahan benturan kepentingan dalam kerja advokasi relasi pribadi dan eksternal, baik dalam konteks interaksi dengan

orang terdekat seperti keluarga, pemerintah daerah, DPRD, dan aktor politik lainnya, maupun dengan para pihak yang berhubungan dengan Fitra Riau.

4. *SOP Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)*, yang memastikan prinsip kesetaraan dan inklusivitas gender terintegrasi dalam kebijakan internal, program, serta praktik kerja organisasi.
5. *SOP Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment (SEAH)*, sebagai bentuk komitmen organisasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan seksual, baik di internal organisasi maupun dalam pelaksanaan kegiatan dengan mitra dan komunitas.

Pembaruan SOP ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian dari proses internalisasi nilai-nilai inklusivitas, etika, integritas, dan profesionalisme di dalam tubuh FITRA Riau.

● **Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi**

FITRA Riau menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip utama dalam pengelolaan organisasi. Upaya ini diwujudkan melalui penguatan sistem pelaporan internal yang lebih rutin dan terstruktur, baik untuk kegiatan program maupun keuangan.

Organisasi berupaya memastikan bahwa informasi dasar mengenai program, capaian advokasi, serta penggunaan sumber daya dapat diakses oleh pengurus, pengawas dan mitra strategis. Praktik ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mitra, sekaligus memperkuat legitimasi FITRA Riau sebagai lembaga pengawas anggaran dan kebijakan publik.

Selain itu, FITRA Riau juga mendorong budaya pertanggungjawaban kolektif, di mana setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawabnya dalam menjaga integritas organisasi, termasuk dalam pengelolaan data, komunikasi publik, dan relasi eksternal.

Seluruh informasi pengelolaan program dan anggaran organisasi dapat diakses melalui website fitriarau.org



2.3. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam menghadapi tantangan advokasi yang semakin kompleks, FITRA Riau menyadari bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan kunci keberlanjutan organisasi. Oleh karena itu, agenda transformasi kelembagaan 2025 difokuskan pada penguatan kapasitas tim melalui pembagian peran yang lebih fungsional antara riset, advokasi, komunikasi publik, dan manajemen organisasi.

Upaya peningkatan kapasitas dilakukan secara bertahap dan realistis, melalui pembelajaran internal, mentoring, serta keterlibatan aktif staf dalam proses riset dan advokasi kebijakan. FITRA Riau juga mendorong terbentuknya budaya kerja yang kolaboratif, kritis, dan beretika, guna memastikan bahwa setiap kerja advokasi dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.

Struktur Badan Pengurus dan Perannya, untuk mendukung kinerja organisasi, berikut peran badan pengurus Fitra Riau 2025-2027.

Posisi	Nama	Fungsi dan Peran Utama
Koordinator FITRA Riau	Tarmizi	Bertanggung jawab atas arah strategis organisasi, memimpin perumusan sikap dan strategi advokasi, memastikan konsistensi kerja dengan visi dan nilai FITRA, serta merepresentasikan organisasi dalam relasi dengan pemerintah daerah, DPRD, media, dan jaringan masyarakat sipil.
Deputi – Manager Knowledge Management	Gusmansyah	Mengelola pengetahuan organisasi, termasuk riset, dokumentasi, dan pengembangan analisis kebijakan. Memastikan kerja advokasi berbasis data dan bukti, serta menjaga kualitas dan keberlanjutan hasil kajian organisasi.
Manager Keuangan	Aksiza Utami Putri	Mengelola perencanaan dan penggunaan anggaran organisasi secara transparan dan akuntabel, menyusun laporan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan internal dan standar akuntabilitas lembaga.
Manager Advokasi dan Pengembangan Jaringan	Sartika Dewi	Mengkoordinasikan strategi advokasi kebijakan dan kampanye publik, memperkuat jejaring dengan masyarakat sipil, media, dan komunitas, serta menjembatani hasil riset dengan proses advokasi dan pengaruh kebijakan.

Staff Keuangan dan Kantor	Suci Lestari Putri	Mengelola data dan administrasi keuangan, kelengkapan perkantoran dan mendukung kinerja organisasi termasuk terlibat dalam tim pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.
Staff Knowledge, Publikasi dan Data	M. Syahrudin	Mendukung pengumpulan dan pengolahan data, serta penyusunan bahan kajian dan advokasi. Serta memproduksi materi komunikasi publik (infografis, rilis media, konten digital)

● **Peningkatan Kapasitas (pelatihan, mentoring, pembelajaran organisasi)**

Sepanjang tahun 2025, FITRA Riau telah melaksanakan berbagai upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai bagian dari konsolidasi organisasi dan penguatan kualitas kerja advokasi. Peningkatan kapasitas ini dilakukan dengan pendekatan yang menyesuaikan kebutuhan riil organisasi serta konteks isu kebijakan di Provinsi Riau. Selain itu, Tim Fitra juga terlibat dalam berbagai kegiatan pelatihan baik ditingkat nasional maupun daerah.

Berikut kegiatan peningkatan kapasitas yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025, diantaranya;

No	Nama	Kegiatan	Penyelenggara
1	Tarmidzi	<ul style="list-style-type: none"> - Sharing session – Praktik-praktik Optimalisasi Manfaat Ekonomi dan Mekanisme <i>Sharing Benefit</i> dari Wilayah Kaya Sumber Daya Alam di Indonesia - Learning series - Peluang Investasi bagi OMS sebagai Strategi Ketahanan Organisasi - Tim Hub Jaringan Inovasi Inovasi Pelayanan Publik (Hub JIPP) BRIDA Provinsi Riau 	<ul style="list-style-type: none"> - Ford Foundation - PolGov UGM, Artikel 33, dan Perkumpulan Migunani - Ford Foundation – Trimegah sekuritas - BRIDA Provinsi Riau
2	Sartika Dewi	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitator Temu Nasional Perempuan Penjaga Hutan. - TA Program “Representatif Perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> - TAF - SEKNAS FITRA

		<p>Dalam Anggaran” IBP, Seknas FITRA, HWDI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggagas Koalisi SETARA - Penyusun Panduan Teknis Pengelolaan Pehutsos berbasis GEDSI. - Narasumber dalam kegiatan Sekolah Keadilan Antargenerasi - MC-Konferensi Nasional Pendanaan EkologisVI 	<ul style="list-style-type: none"> - Koalisi Setara - Koalisi NGO, Inisiasi YMI - WALHI RIAU - TAF-KMSPE
3	Gusmansyah	<ul style="list-style-type: none"> - “Forum Legislasi”Menata Arah Reformasi Politik Indonesia dan dinamika Pembahasan Paket Revisi UU Politik di Parlemen - Seminar Percepatan Hilirisasi Dan Ketahanan Energi Nasional - Strategi Menciptakan Ketahanan Pangan Non APBD Yang Dapat Meningkatkan PAD Riau - Narasumber/Fasilitasi Penyusunan Proposal Kegiatan HWDI Provinsi Riau - Narasumber Ecological Fiscal Transfer (EFT) Goes To Campus (UNRI) - Narasumber Teknik Pemantauan Ketersediaan Data dalam SILEGDA di DPRD Provinsi Riau - Narasumber Peningkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Komunitas Perempuan Desa Dalam Proses Legislasi desa di Kabupaten Bengkalis 	<ul style="list-style-type: none"> - IPC - Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SDP) - UNRI - FISIP UNRI - LAB Fisip UNRI - INSPIRATIF - LAB Fisip Unri - IBP - Seknas Fitra - TAF - FISIP UNRI - TIFA - TIFA

4	M.Syahrudin	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kapasitas Terkait Perlindungan Data Pribadi Bagi Organisasi Masyarakat Sipil dan Kaum Muda 	<ul style="list-style-type: none"> - ELSAM
5	Aksiza Utami	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta Pelatihan Sistem Keuangan The Asia Foundation - Meeting Koordinasi Keuangan dan Program FF - Meeting Kordinasi Keuangan dan program TIFA 	<ul style="list-style-type: none"> - TAF - FF - TIFA
6	Suci Lestari	<ul style="list-style-type: none"> - Meeting Koordinasi Keuangan dan Program FF - Meeting Kordinasi Keuangan dan program TIFA 	<ul style="list-style-type: none"> - FF - TIFA

● Budaya Kerja dan Etika Organisasi

Budaya kerja dan etika organisasi FITRA Riau merupakan fondasi utama dalam menjalankan peran sebagai lembaga riset dan advokasi kebijakan anggaran publik. Di tengah tantangan tata kelola pemerintahan daerah, dinamika politik lokal, serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi, FITRA Riau meyakini bahwa kualitas advokasi hanya dapat terjaga apabila ditopang oleh nilai, sikap, dan praktik kerja organisasi yang konsisten dan berintegritas.



Sebagaimana tergambar dalam diagram, budaya kerja organisasi FITRA Riau dibangun di atas lima nilai utama yang saling terhubung dan membentuk satu kesatuan sistem kerja. Nilai pertama adalah integritas, yang menjadi landasan moral dalam setiap aktivitas organisasi. Integritas dimaknai sebagai komitmen untuk menjunjung tinggi transparansi, menolak praktik korupsi, serta mematuhi hukum dan etika dalam kerja riset, advokasi, maupun relasi dengan pemangku kepentingan. Nilai ini memastikan bahwa sikap kritis FITRA Riau terhadap kebijakan publik tetap berpijak pada prinsip kejujuran dan tanggung jawab.

Nilai kedua adalah kemandirian, yang menegaskan posisi FITRA Riau sebagai organisasi yang bebas dari intervensi politik,

birokrasi, maupun kepentingan tertentu. Kemandirian ini penting untuk menjaga objektivitas analisis, keberanian bersikap, dan konsistensi advokasi, terutama dalam isu-isu anggaran dan kebijakan publik yang sarat kepentingan. Dengan prinsip kemandirian, FITRA Riau berupaya memastikan bahwa setiap rekomendasi kebijakan semata-mata berpihak pada kepentingan publik.

Selanjutnya, akuntabilitas menjadi nilai yang menegaskan tanggung jawab FITRA Riau kepada publik. Organisasi berkomitmen untuk bersikap terbuka atas kerja-kerja riset dan advokasi yang dilakukan, termasuk menyampaikan hasil kajian, sikap kebijakan, serta penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab. Akuntabilitas ini tidak hanya ditujukan ke luar, tetapi juga diterapkan secara internal melalui mekanisme pelaporan dan evaluasi kerja.

Nilai keempat adalah keberpihakan, yang mencerminkan orientasi utama FITRA Riau dalam memperjuangkan kepentingan kelompok rentan dan masyarakat yang terdampak kebijakan publik. Dalam konteks pengelolaan anggaran daerah, keberpihakan diwujudkan melalui upaya memastikan bahwa suara dan kebutuhan kelompok miskin, perempuan, serta komunitas terdampak pembangunan mendapat ruang dalam proses perencanaan dan penganggaran publik.

Kelima, kerja kolektif menjadi prinsip operasional dalam menjalankan aktivitas organisasi. FITRA Riau mengedepankan kerja tim, pembelajaran bersama, dan solidaritas sebagai cara untuk memperkuat kualitas analisis dan daya dorong advokasi. Budaya kerja kolektif memungkinkan organisasi merespons isu kebijakan secara lebih komprehensif, sekaligus menjaga ketahanan internal di tengah tekanan kerja advokasi.

Kelima nilai tersebut berkelindan dalam satu sistem budaya kerja organisasi yang bertujuan mendukung tata kelola anggaran publik yang transparan dan berpihak pada rakyat. Melalui penguatan budaya kerja dan etika organisasi ini, FITRA Riau tidak hanya mendorong perubahan tata kelola ke luar, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial dilaksanakan secara konsisten di dalam organisasi.

2.4. Penguatan Jejaring dan Kemitraan

Dalam konteks politik dan kebijakan Riau yang dinamis, FITRA Riau memandang jejaring sebagai aset strategis organisasi. Agenda transformasi kelembagaan diarahkan pada penguatan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil lokal dan nasional, media, akademisi, serta komunitas warga yang terdampak kebijakan publik.

FITRA Riau juga menjaga relasi kritis–konstruktif dengan pemerintah daerah dan DPRD, dengan menempatkan dialog kebijakan sebagai instrumen advokasi utama tanpa mengorbankan independensi organisasi. Di sisi lain, kemitraan dengan lembaga donor dan jaringan nasional terus dibangun secara selektif untuk memastikan keberlanjutan kerja advokasi dan keselarasan nilai.

Penguatan jejaring dan kemitraan telah terbangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam mendukung kinerja organisasi yaitu sebagai berikut;

- **Kerjasama Perguruan Tinggi**

Untuk memperkuat riset dan gerakan advokasi, sepanjang tahun 2025 Fitra Riau telah bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di Riau dan nasional, antara lain;

Perguruan Tinggi	Bidang Kerjasama
Universitas Riau – Fakultas FISIP	<ul style="list-style-type: none"> - Pembejalan Kebijakan Ecological Fiscal Transfer (EFT) Goes to Campus - Pengembangan kurikulum – Jurusan Ilmu Politik Lingkungan (S1)
Universitas Riau – Fakultas FKIP	<ul style="list-style-type: none"> - Program Magang Mahasiswa
Universitas Lancang Kuning – Fakultas FIA	<ul style="list-style-type: none"> - Pembejalan Kebijakan Ecological Fiscal Transfer (EFT) Goes to Campus - Kolaborasi Riset kebijakan keterbukaan informasi
Sekolah Tinggi Jentera Hukum Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi Riset Keterbukaan Informasi HTI

○ **Kolaborasi/koalisi CSO**

Kolaborasi/koalisi	Objek advokasi	Capaian
Indonesia Parliamentary Center/IPC	Riset dan advokasi Sistem legislasi di DPRD Riau	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi Silegda DPRD Riau
Seknas Fitra	Advokasi anggaran Kesehatan Reproduksi Perempuan penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas perempuan penyandang disabilitas - Advokasi di tingkat pemerintah
Jikalahari	Kajian keterbukaan informasi HTI	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil kajian diserahkan ke Kemenhut
Koalisi Penyandang Disabilitas Provinsi Riau	Mendorong proses legislasi yang partisipatif perda perlindungan disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ditetapkan perda perlindungan disabilitas
Koalisi Perempuan penyandang disabilitas Kota Pekanbaru	Mendorong anggaran responsif terhadap Kesehatan reproduksi perempuan penyandang disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Audiensi & penyerahan rekomendasi kepada Pemko Pekanbaru

Koalisi NGO Perda Perhutanan Sosial	Mendorong percepatan perda disabilitas	- Tersusunnya kajian urgensi perda PS Riau
Koalisi NGO Bengkalis Lestari	Mendorong kebijakan Bengkalis Lestari untuk pembangunan berkelanjutan	- Tersusunnya RAD dan telah ditetapkan Perbup Bengkalis Lestari

○ **Relasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD, serta Lembaga terkait**

Relasi Pemerintah Daerah	Kolaborasi	Progress
Provinsi Riau	- Dorongan Percepatan Transisi Energi dan pengelolaan PI sektor Migas mendukung kesejahteraan masyarakat	On proses
DPRD Riau (Sekwan)	- Penerapan SILEGDA	selesai
DPRD Riau (Komisi II)	- Percepatan Perda Perhutanan Sosial	On proses
Kabupaten Bengkalis	- Pengembangan skema Redistribusi DBH Migas ke desa penghasil - Implementasi Program Bengkalis Lestari - Pengembangan kebijakan EFT/TAKE	On proses
Kabupaten Siak	- Pengembangan Kebijakan EFT/TAKE dan sistem penilaian kinerja - Konsep Pembentukan Lembaga Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup	selesai
Kabupaten Pelalawan	- Pengembangan program Pelalawan Sejuk - Pendampingan kebijakan EFT/TAKE Pelalawan	On proses
Kota Dumai	- Pengembangan dan evaluasi kebijakan EFT/ALAKE	On proses
Kabupaten Rohul	- Implementasi kebijakan redistribusi DBH migas - Pengembangan kebijakan EFT/TAKE	selesai
Kabupaten Inhu	- Pengembangan kebijakan EFT/TAKE	selesai
Kabupaten Inhil	- Pengembangan kebijakan EFT/TAKE	selesai
Kabupaten Rohil	- Pengembang Kebijakan EFT/TAKE	On proses
Kota Pekanbaru	- Dorongan tata kelola dan anggaran persampahan	selesai

	- Advokasi anggaran reproduksi perempuan penyandang disabilitas	
DPRD Riau, Pelalawan, Siak, Kampar, Inhu	- Inisiasi pembentukan Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD)	On Proses
Komisi Informasi Provinsi Riau	- Peningkatan kinerja keterbukaan informasi publik	Setiap tahun
Bawaslu Kabupaten Bengkalis	- Evaluasi Pengawasan Partisipatif Pemilu serentak 2024	selesai

o **Dukungan Donor/mitra NGO**

Donor/Mitra NGO	Kerjasama	Ket.
TAF	Inisiasi kebijakan skema EFT dan pendanaan hijau di daerah	selesai
TIFA	Mendorong Penerapan Silegda yang partisipatif	selesai
Seknas FITRA	Program PRIMA	selesai
Jikalahari	Kajian Keterbukaan Informasi HTI	selesai
Ford Foundation	Tata kelola SDA migas dan transisi energi untuk kesejahteraan masyarakat terdampak	On Proses

2.5. Pembelajaran dan Tantangan Transformasi Kelembagaan

Pelaksanaan agenda transformasi kelembagaan sepanjang 2025 memberikan sejumlah pembelajaran penting bagi FITRA Riau. Di satu sisi, penguatan sistem internal meningkatkan kejelasan arah kerja dan koordinasi tim. Namun, di sisi lain, keterbatasan sumber daya dan tingginya dinamika isu kebijakan menuntut organisasi untuk terus beradaptasi secara realistis.

Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan pendanaan jangka panjang, meningkatnya beban kerja advokasi, serta risiko tekanan politik terhadap ruang gerak masyarakat sipil. Menghadapi situasi tersebut, FITRA Riau menegaskan komitmen untuk terus memperkuat fondasi kelembagaan sebagai prasyarat utama agar advokasi kebijakan dapat dijalankan secara konsisten, independen, dan berdampak.

BAB III

AGENDA RISET DAN ADVOKASI KEBIJAKAN

3.1. Kerangka Riset dan Advokasi FITRA Riau 2025



Pada tahun 2025, FITRA Riau menjalankan agenda riset dan advokasi untuk merespons persoalan tata kelola anggaran dan kebijakan publik yang masih menghadapi tantangan transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat. Kerja riset-advokasi difokuskan pada isu-isu strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan publik.

Isu prioritas advokasi FITRA Riau meliputi transparansi dan akuntabilitas APBD, pencegahan korupsi dalam pengelolaan anggaran daerah, penguatan komitmen anggaran untuk ketahanan bencana dan perlindungan kelompok rentan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta perluasan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.

Dalam menjalankan agenda tersebut, FITRA Riau menerapkan pendekatan riset berbasis bukti dan partisipatif, melalui analisis dokumen anggaran dan kebijakan, pengumpulan data lapangan, serta pelibatan masyarakat dan jaringan masyarakat sipil. Hasil riset kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk komunikasi publik, seperti siaran pers, infografis, diskusi publik, dan opini kebijakan, untuk membangun kesadaran dan tekanan publik.

Integrasi antara riset, kampanye, dan advokasi kebijakan menjadi kunci strategi FITRA Riau. Riset menjadi dasar rekomendasi kebijakan, kampanye publik memperluas dukungan dan legitimasi, sementara advokasi kebijakan diarahkan pada dialog dan pengaruh terhadap pemerintah daerah dan DPRD. Melalui pendekatan terintegrasi ini, FITRA Riau berupaya mendorong tata kelola anggaran dan kebijakan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada keadilan sosial serta pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau.

3.2. Kajian/Analisis Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Anggaran Daerah

Kajian/analisis terkait keterbukaan informasi dan tata kelola anggaran daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu, antara lain;

1. Kajian dampak pemangkasan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) Provinsi Riau dan 12 Kabupaten/Kota Tahun 2025.
2. Analisis anggaran program prioritas dan efisiensi belanja program rutin.
3. Analisis anggaran ketahanan bencana dan belanja tidak terduga/BTT.

4. Kajian Komitmen Kebijakan Anggaran Berkelanjutan Provinsi Riau;
5. Kajian dukungan anggaran pembangunan lingkungan hidup mendukung Bengkalis Lestari.
6. Kajian kebijakan anggaran kesehatan reproduksi perempuan penyandang disabilitas Kota Pekanbaru
7. Kajian dampak penurunan APBD Provinsi Riau tahun 2026.
8. Kajian Keterbukaan Informasi HTI di Indonesia
9. Kajian Urgensi Percepatan Perhutanan Sosial untuk Perlindungan Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat.
10. Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran Provinsi Riau & 12 Kabupaten/kota
11. Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Legislasi Provinsi Riau & 12 Kabupaten/kota

3.3. Advokasi Transparansi dan Anti-Korupsi

- Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
 1. Media briefing; mendorong keterbukaan informasi anggaran provinsi riau dan 12 kabupaten Kota;
 2. Diskusi dan asistensi DPRD Riau penerapan sistem informasi legislasi daerah (SILEGDA)
- Pemantauan Integritas dan Kasus Korupsi di Riau
 1. Diskusi dan media briefing terkait hasil audit keuangan daerah tahun 2024 bersama NGO dan Mahasiswa
 2. Podcast/diskusi paparan kasus korupsi di Riau bersama Senarai
 3. Publikasi korupsi anggaran daerah Provinsi Riau dan 12 Kabupaten/Kota (Peringatan Harkordia 2025)

3.4. Advokasi Sektor Strategis

- Migas dan Transisi Energi untuk Kesejahteraan Masyarakat
 1. Diskusi dan asistensi dorongan kebijakan redistribusi DBH Migas ke desa Penghasil di Kabupaten Bengkalis
 2. Diskusi para pihak mendorong Peningkatan Anggaran untuk Percepatan Transisi Energi di Provinsi Riau
- Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perubahan Iklim
 1. Diskusi Multipihak mendorong percepatan implementasi Perda Perhutanan Sosial Provinsi Riau
 2. Diskusi dan Asistensi Integrasi EFT dalam RPJMD Kota Dumai
 3. Diskusi dan Asistensi Integrasi EFT dalam RPJMD Kabupaten Pelalawan
 4. Diskusi dan Asistensi Integrasi EFT dan RAD Bengkalis Lestari dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis
 5. Diskusi dan Asistensi Integrasi EFT dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu
 6. Diskusi dan asistensi penerapan skema EFT mendukung pembangunan berkelanjutan Kabupaten Rohil
- Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial
 1. Diskusi bersama kelompok penyandang disabilitas mendorong peningkatan layanan sosial dasar di Provinsi Riau.
 2. Peningkatan kapasitas kelompok penyandang disabilitas terkait kebijakan anggaran pro disabilitas

3. Membangun koalisi bersama kelompok penyandang disabilitas untuk pengawasan perda perlindungan disabilitas provinsi riau
4. Peningkatan kapasitas perempuan penyandang disabilitas terkait pemenuhan anggaran kesehatan reproduksi
5. Coaching klinik perempuan penyandang disabilitas dalam penyusunan program/kegiatan yang inklusi dan ramah disabilitas di Kota Pekanbaru
6. Audiensi bersama pemda Kota Pekanbaru mendorong kebijakan anggaran yang inklusi dan ramah disabilitas.

3.5. Kampanye Publik dan Diseminasi Pengetahuan

- **Press Release dan Opini Media**

No	Pers Rilis
1	FITRA Keluarkan Hasil indeks kinerja keterbukaan Informasi Anggaran tahun 2024
2	Daerah Defisit Anggaran, Salah Siapa?
3	Langkah Gubernur Riau Atasi Defisit Anggaran Daerah
4	Banggar DPRD Riau Ungkap Alasan Belanja Operasional APBD 2026 Tinggi, Fitra Ingatkan Hal Ini
5	Kategori Daerah Rentan Korupsi, Skor Integritas Rendah Jadi Alarm Darurat di Riau
6	FITRA Riau Apresiasi Lima Daerah di Riau Raih EFT Award Tingkat Nasional Tahun 2025
7	Rincian Hasil SPI 2025 Kabupaten/Kota di Riau, 10 Daerah Skor Rendah, Fitra Peringatkan Soal Korupsi
8	Anggaran Ketahanan Bencana Riau Melemah Saat Status Siaga Darurat Ditetapkan
9	APBD Riau 2026 Harus Lebih Transparan, Akuntabel, dan Responsif Menghadapi Defisit Anggaran
10	APBD Riau 2026 Defisit Rp 1,2 Triliun, FITRA: Jangan Korbankan Layanan Publik
11	Tahun 2026, Pendapatan Daerah se-Riau Diproyeksikan Anjlok, Pemenuhan Layanan Dasar dan Ekonomi Masyarakat Terancam.
12	Analisis Fitra; Tambahan Penghasilan ASN Riau Membengkak, Prioritas Pembangunan Dipertanyakan
13	DPRD Harus Jadi Teladan Efisiensi, Bukan Beban Fiskal
14	Wawancara Metro TV: Lagi-lagi Gubernur Riau di OTT, Bukti Gagalnya Fero
15	“OTT Gubernur Riau Bukti Pengkhianatan terhadap Publik- Infrastruktur Hanya Jadi Bancakan”
16	Dialog TVRI Riau: Kondisi Keuangan Riau 2025, Strategi Pemda Atasi Defisit Anggaran
	Opini Media
17	Ketimpangan Fiskal: Negara Kaya, Daerah Terjepit

18	Dampak Pemangkasan TKD terhadap Pembangunan Desa
----	--

● **Infografis, Policy Brief, dan Laporan Tematik**

No	Infografis
1	Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran dan SILEGDA DPRD Provinsi Riau & 12 Kabupaten/Kota
2	Kapasitas Fiskal Daerah Riau
3	Tahun 2026, Pendapatan Daerah se-Riau Diproyeksikan Anjlok, Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Ekonomi Masyarakat Terancam
4	Transparansi PAD Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik & Morale
5	Dukungan Anggaran dan Skema Pengelolaan Perhutanan Sosial Provinsi Riau
6	Hari Anti Korupsi Dunia (HARKODIA) 2025 - Tren Kasus Korupsi di Riau
	Policy Brief
7	Substansi Perda Perhutanan Sosial PROVINSI Riau 2025
8	Penilaian Ketersediaan Informasi Sistem Legislasi Daerah (SILEGDA) DPRD Riau Tahun 2024
9	Komitmen Kebijakan Anggaran Berkelanjutan Provinsi Riau
10	Pengembangan Sistem Informasi Legislasi Daerah
	Laporan Tematik
11	Laporan Hasil Pemantauan Implementasi Sistem Legislasi Daerah (SILEGDA)
12	Kajian Terbuka Informasi HTI Di Indonesia 2025
13	Tools Pemantauan Penerapan SILEGDA DPRD Provinsi Riau
14	Rencana Aksi Daerah Menuju Kabupaten Bengkalis Lestari

3.6. Dampak dan Perubahan dari Kerja FITRA Riau

Sepanjang tahun 2025, kerja riset dan advokasi FITRA Riau tidak hanya menghasilkan kajian dan pernyataan sikap kebijakan, tetapi juga mendorong perubahan pada tingkat kesadaran publik, praktik tata kelola, serta cara masyarakat dan pemangku kepentingan memandang isu anggaran dan kebijakan publik. Dampak tersebut terlihat baik dalam bentuk peningkatan kesadaran, perubahan praktik, maupun cerita perubahan di tingkat lokal.

● **Peningkatan Kesadaran Publik**

Salah satu dampak utama kerja FITRA Riau adalah meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah. Melalui publikasi kajian, siaran pers, diskusi publik, serta kampanye berbasis media, isu-isu anggaran yang sebelumnya bersifat teknokratis dan tertutup mulai dipahami sebagai persoalan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Diskursus publik terkait APBD, belanja prioritas, belanja tidak terduga, anggaran ketahanan bencana, serta risiko korupsi anggaran semakin sering muncul dalam pemberitaan media dan ruang diskusi publik. Masyarakat, khususnya kelompok masyarakat sipil dan komunitas terdampak, mulai memiliki rujukan data dan argumen untuk mempertanyakan kebijakan anggaran daerah secara lebih kritis dan berbasis bukti.

Peningkatan kesadaran ini juga tercermin dari semakin terbukanya ruang dialog antara masyarakat sipil, media, dan pemerintah daerah. Isu yang diangkat FITRA Riau tidak lagi dipandang sebagai kritik semata, tetapi sebagai masukan berbasis data yang relevan dalam perbaikan tata kelola kebijakan publik.

- **Praktik Baik dan Cerita Perubahan (stories of change)**

Kerja advokasi FITRA Riau sepanjang 2025 juga menghasilkan sejumlah praktik baik dan cerita perubahan, baik di tingkat kebijakan maupun proses pengambilan keputusan publik.

Salah satu cerita perubahan terlihat dari meningkatnya penggunaan data dan kajian independen dalam diskusi kebijakan daerah. Kajian FITRA Riau kerap dijadikan rujukan oleh media, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas warga dalam mengkritisi kebijakan anggaran, sehingga memperkuat posisi masyarakat dalam dialog kebijakan yang sebelumnya didominasi aktor formal.

Perubahan juga terlihat dalam cara pemerintah daerah merespons kritik publik. Dalam beberapa isu advokasi, pemerintah daerah mulai memberikan klarifikasi terbuka dan merespons masukan masyarakat sipil, menunjukkan adanya pergeseran dari sikap defensif menuju komunikasi kebijakan yang lebih terbuka, meskipun belum sepenuhnya konsisten.

Cerita perubahan lainnya muncul dari penguatan jejaring masyarakat sipil dan media lokal. Kolaborasi yang terbangun sepanjang 2025 memperluas daya jangkauan advokasi, mempercepat penyebaran informasi publik, serta menciptakan solidaritas dalam mengawal isu-isu tata kelola anggaran dan kebijakan publik di Riau.

BAB IV

AKUNTABILITAS PROGRAM DAN KEUANGAN

4.1. Ikhtisar Program dan Kegiatan 2025

Sepanjang Januari–Desember 2025, FITRA Riau melaksanakan rangkaian program riset, advokasi kebijakan, penguatan kapasitas masyarakat, serta kampanye publik yang berfokus pada tata kelola anggaran daerah, keterbukaan informasi, perlindungan kelompok rentan, dan pembangunan berkelanjutan. Program-program tersebut dilaksanakan di tingkat provinsi serta berbagai kabupaten/kota di Riau, dengan pendekatan kolaboratif bersama pemerintah daerah, DPRD, perguruan tinggi, media, dan organisasi masyarakat sipil.

Secara lebih rinci, berikut kegiatan riset dan advokasi yang telah dilaksanakan pada periode Januari - Desember 2025.

Bulan	Kegiatan
Januari	<ul style="list-style-type: none">- Media briefing; laporan indeks keterbukaan informasi Anggaran Provinsi Riau & Kabupaten Kota dan Hasil Asesmen Informasi Silegda Provinsi Riau- Peningkatan Kapasitas Perempuan dan Penyandang Disabilitas dalam Legislasi Daerah
Februari	<ul style="list-style-type: none">- Evaluasi dan Penguatan Instrumen Penilaian Kinerja Desa di Siak: Menuju Pembangunan Berkelanjutan- FITRA Riau dan DPMK Rohil Evaluasi Kinerja Desa 2024, Bahas Pengalokasian ADK 2025- Peningkatan Kapasitas BPD dan Perempuan Desa dalam Legislasi Desa di Bengkalis
Maret	<ul style="list-style-type: none">- Diskusi dan media briefing terkait hasil audit keuangan daerah tahun 2024 bersama NGO dan Mahasiswa- Podcast/diskusi paparan kasus korupsi di Riau bersama Senarai
April	<ul style="list-style-type: none">- FGD pembahasan RAD Bengkalis Lestari, Bappeda Lanjutkan Konsolidasi Lintas OPD- Audiensi dengan Gubernur Riau: “Dorong Eksekusi Kebijakan Lingkungan Yang Kuat”.- FITRA Riau Inisiasi Penguatan SILEGDA Bersama DPRD Riau: Menuju Legislasi Daerah yang Transparan
Mei	<ul style="list-style-type: none">- Integrasi Skema Insentif Lingkungan Ke Dalam RPJMD Inhu 2025–2029, Pemda Tegaskan Komitmen Berkelanjutan- Pelalawan Kukuhkan Komitmen Lingkungan: Skema TAKE Resmi Terintegrasi ke RPJMD 2025–2029- EFT Goes to Campus”: Fitra Riau Gandeng Mahasiswa Unilak Perkuat Peran Pemuda dalam Keadilan Ekologis- FITRA Riau Gandeng FISIP UNRI Gelar “Ecological Fiscal Transfer Goes to Campus”: Dorong Peran Mahasiswa dalam Kebijakan Lingkungan

Juni	<ul style="list-style-type: none"> - Fitra Riau Bersama DPRD Riau Perkuat Transparansi Legislatif dengan Implementasi SILEGDA - Mendorong Percepatan PUG, Perkuat Peran Perempuan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Juli	<ul style="list-style-type: none"> - Coaching Mountly Perempuan Penyandang Disabilitas untuk advokasi anggaran di Kota Pekanbaru - Pelatihan Anggaran Advokasi berbasis GEDSI yang dilaksanakan oleh SEKNAS FITRA
Agustus	<ul style="list-style-type: none"> - Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis ke VI
September	<ul style="list-style-type: none"> - FGD 1 Penyusunan Kerangka Analisis dan Pembagian Fokus Kajian Evaluasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Sektor HTI - FGD 2 Pemetaan Aktor, Kerangka Analisis Lanjutan dan Strategi Advokasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Sektor PBPH - HTI - Audiensi bersama OMBUDSMAN RIAU terkait layanan dasar bagi penyandang disabilitas
Oktober	<ul style="list-style-type: none"> - Koalisi CSO & Pemprov Riau Bahas Penguatan Ranperda Perhutanan Sosial - Konsultasi Publik : Kajian Evaluasi Kebijakan Keterbukaan Publik (KIP) Sektor PBPH-HTI
November	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Diseminasi Hasil Kajian Evaluasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Sektor PBPH-HTI
Desember	<ul style="list-style-type: none"> - FITRA Riau–BAPPEDA Bengkalis Koordinasikan Program Tata Kelola SDA untuk Kesejahteraan

4.2. Ringkasan Dukungan Mitra/Donor Tahun 2025

Pada tahun 2025, pelaksanaan program FITRA Riau didukung oleh sejumlah mitra donor dan organisasi masyarakat sipil, baik nasional maupun internasional. Dukungan tersebut memungkinkan FITRA Riau menjalankan agenda riset dan advokasi secara berkelanjutan, sekaligus memperluas jangkauan isu dan wilayah dampak.

Mitra/Donor	Anggaran	Priode Waktu
TAF	Rp 1,058,245,118	s/d Juni 2025
TIFA	Rp 172,308,991	s/d Maret 2025
Jikalahari	Rp 58,450,000	Sept-Nov 2025
Ford Foundation	Rp 1,652,000,000	Okt 2025- Marc 2027
Total	Rp 2,941,004,109	

Detail laporan pengelolaan dan penggunaan anggaran tahun 2025 terlampir dalam laporan keuangan.

BAB V

PEMBELAJARAN, TANTANGAN, DAN ARAH KE DEPAN

5.1. Refleksi Organisasi Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi periode penting bagi FITRA Riau dalam mengonsolidasikan peran sebagai lembaga riset dan advokasi kebijakan publik di tingkat daerah. Di tengah dinamika politik lokal, keterbatasan sumber daya, serta meningkatnya kompleksitas isu tata kelola anggaran, FITRA Riau berupaya menjaga konsistensi mandat advokasi yang berbasis data, independen, dan berpihak pada kepentingan publik.

Refleksi organisasi menunjukkan bahwa agenda transformasi kelembagaan yang dijalankan sepanjang 2025 berkontribusi positif terhadap keteraturan kerja internal, kejelasan peran, dan kualitas proses advokasi. Penguatan tata kelola internal, peningkatan kapasitas SDM, serta pembenahan sistem kerja mendorong organisasi bekerja lebih terstruktur dan adaptif. Meskipun belum seluruh target perubahan tercapai secara optimal, tahun 2025 menjadi pondasi penting bagi penguatan organisasi dalam jangka menengah.

5.2. Tantangan Utama yang Dihadapi

Sepanjang tahun 2025, FITRA Riau menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kontekstual. Tantangan utama berasal dari menyempitnya ruang partisipasi publik dalam proses kebijakan daerah, terutama pada isu-isu strategis yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan sumber daya alam. Resistensi sebagian aktor terhadap transparansi dan pengawasan publik masih menjadi hambatan dalam mendorong perubahan kebijakan yang lebih substantif.

Di sisi internal, keterbatasan pendanaan jangka panjang dan tingginya beban kerja advokasi menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keberlanjutan dan kualitas kerja organisasi. Selain itu, tuntutan profesionalisme yang semakin tinggi mengharuskan organisasi terus beradaptasi, baik dalam pengelolaan program, komunikasi publik, maupun penguatan kapasitas tim.

5.4. Arah Strategis FITRA Riau Tahun 2026

Berdasarkan refleksi, tantangan, dan pembelajaran sepanjang 2025, FITRA Riau menetapkan arah strategis tahun 2026 dengan fokus pada penguatan keberlanjutan organisasi dan pendalaman kualitas riset dan advokasi.

Penguatan kelembagaan, FITRA Riau akan melanjutkan penguatan kapasitas SDM, penyempurnaan sistem manajemen organisasi, serta diversifikasi sumber pendanaan untuk menjaga independensi dan keberlanjutan kerja. Organisasi juga akan memperluas kolaborasi strategis dan memperkuat komunikasi publik sebagai bagian dari upaya meningkatkan dampak advokasi.

Agenda penguatan kelembagaan tahun 2026

No	Strategi	Agenda	Indikator Kinerja
1.1	Penataan organisasi dan penguatan tata kelola internal	1. Review struktur organisasi berbasis kompetensi; 2. Penerapan sistem monitoring internal dan pelaporan rutin; 3. Mentoring dan pembinaan antara pengurus dan dewan pengawas;	Laporan berkala struktur dan pelaksanaan mentoring
1.2	Penguatan kapasitas SDM	1. Pelatihan tematik berbasis isu aktual; 2. Pemetaan dan redistribusi SDM;	Jumlah pelatihan
1.3	Pengembangan unit usaha dan pendanaan mandiri	1. Pembentukan BUMF dan pengembangan lini usaha; 2. Penetapan model bisnis sosial untuk mendukung program; 3. Pemisahan keuangan usaha dan program;	BUMF terbentuk & aktif, kontribusi pendanaan dari usaha
1.4	Penguatan sistem pengetahuan organisasi	1. Digitalisasi dokumen dan hasil kajian; 2. Portal pengetahuan berbasis open access; 3. Pelatihan manajemen data dan publikasi internal	Portal tersedia dan terisi, pelatihan terselenggara
1.5	Kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan	1. Penyusunan sistem kaderisasi jangka Panjang 2. Magang internal dan kerja sosial untuk kader muda; 3. Pelibatan aktif dalam pengambilan keputusan	Dokumen kaderisasi, jumlah kader aktif

Agenda Riset dan Advokasi tahun 2026

Peningkatan agenda riset dan advokasi akan diarahkan pada penguatan tata kelola anggaran berkelanjutan, ketahanan bencana, pengelolaan sumber daya alam yang adil, serta perlindungan kelompok rentan dalam kebijakan daerah.

No	Strategi	Agenda	Indikator Kinerja
2.1	Mendorong transparansi dan akuntabilitas anggaran publik	1. Penguatan IKIP dan dashboard keterbukaan anggaran 2. Kolaborasi audit sosial berbasis masyarakat	Jumlah pemda terbuka Hasil audit sosial

		3. Advokasi legislasi daerah untuk keterbukaan	
2.2	Advokasi anggaran responsif dan inklusif	1. Pelatihan anggaran responsif gender (ARG) & inklusi sosial 2. Integrasi ARG ke RPJMD dan APBD 3. Monitoring anggaran inklusi di sektor pendidikan, kesehatan, sosial	Jumlah daerah menerapkan ARG Dokumen analisis inklusi
2.3	Penguatan kapasitas pemma dan desa	1. Pelatihan perencanaan desa inklusif 2. Pendampingan BPD dan perangkat desa 3. Advokasi penguatan peran perempuan dan disabilitas dalam musrenbang	Jumlah pelatihan partisipasi kelompok rentan meningkat
2.4	Tata kelola SDA dan ekonomi berkelanjutan	1. Advokasi pengelolaan DBH dan DAD untuk kesejahteraan 2. Kajian tata kelola industri ekstraktif 3. Kampanye transisi energi terbarukan 4. Penguatan Ecological Fiscal Transfer	Dokumen kebijakan kajian DAD partisipasi publik
2.5	Advokasi untuk sektor maritim dan pesisir	1. Advokasi blue economy dan anggaran nelayan 2. Penguatan koperasi nelayan dan kelompok perempuan pesisir 3. Monitoring pemanfaatan dana kelautan di daerah	Usulan anggaran sektor maritim pelibatan masyarakat pesisir
2.6	Penguatan partisipasi publik	1. Pendidikan anggaran untuk komunitas (budget school) 2. Forum dialog multi-pihak berbasis isu prioritas 3. Penyediaan platform laporan warga terhadap anggaran	Jumlah komunitas terlibat Laporan publik
2.7	Membangun kepercayaan dan legitimasi publik	1. Publikasi reportase program dan riset 2. Aktivasi media sosial dan kanal komunikasi publik 3. Survei kepercayaan tahunan	Jumlah publikasi dan pengikut Hasil survei persepsi

Dengan arah strategis tersebut, FITRA Riau menegaskan komitmen untuk tetap menjadi aktor masyarakat sipil yang kredibel, kritis, dan konsisten dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada keadilan sosial di Provinsi Riau.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan Umum

Laporan Tahunan FITRA Riau Tahun 2025 menunjukkan bahwa kerja riset dan advokasi kebijakan publik tetap relevan dan dibutuhkan di tengah tantangan tata kelola pemerintahan daerah yang kompleks. Sepanjang tahun 2025, FITRA Riau tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan anggaran dan kebijakan publik, tetapi juga melakukan konsolidasi internal untuk memperkuat fondasi kelembagaan organisasi.

Agenda transformasi kelembagaan yang dijalankan berkontribusi pada peningkatan kualitas tata kelola internal, kejelasan peran organisasi, serta integrasi yang lebih baik antara riset, kampanye publik, dan advokasi kebijakan. Di sisi lain, kerja advokasi FITRA Riau berhasil mendorong peningkatan kesadaran publik terhadap isu transparansi, akuntabilitas anggaran, dan keberpihakan kebijakan, meskipun perubahan kebijakan yang bersifat struktural masih berlangsung secara bertahap.

Secara keseluruhan, capaian dan pembelajaran tahun 2025 menegaskan bahwa perubahan tata kelola publik membutuhkan kerja advokasi yang konsisten, berbasis data, dan berjejaring luas. FITRA Riau memandang tahun 2025 sebagai fase penting dalam memperkuat posisi organisasi sebagai aktor masyarakat sipil yang kredibel, independen, dan berorientasi pada dampak jangka menengah dan panjang.

B. Komitmen FITRA Riau ke Depan

Berdasarkan refleksi dan pembelajaran sepanjang tahun 2025, FITRA Riau menegaskan komitmen untuk terus memperkuat peran sebagai lembaga riset dan advokasi kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan keadilan sosial. Ke depan, FITRA Riau berkomitmen untuk menjaga independensi organisasi, memperdalam kualitas riset kebijakan, serta meningkatkan efektivitas advokasi melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan strategis.

FITRA Riau juga berkomitmen untuk memperkuat tata kelola internal, transparansi, dan akuntabilitas organisasi sebagai bagian dari praktik nilai yang diperjuangkan dalam ruang publik. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan jejaring strategis, serta diversifikasi sumber pendanaan akan menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan dan integritas organisasi.

Dalam konteks kebijakan daerah, FITRA Riau berkomitmen untuk terus mendorong tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kelompok rentan, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Provinsi Riau. Dengan komitmen tersebut, FITRA Riau berharap dapat terus menjadi mitra kritis bagi pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan bertanggung jawab.

LAMPIRAN

- Daftar Publikasi dan Produk Pengetahuan



Infografis

Infografis adalah bentuk visualisasi data yang menggunakan gambar, grafik, dan tabel untuk menyampaikan informasi secara singkat dan jelas.



INFOGRAFIS
KAPASITAS FISKAL DAERAH RIAU
© April 7, 2025



INFOGRAFIS
Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran dan SILEGDA DPRD Provinsi Riau & 12 Kabupaten/Kota
© Januari 18, 2025



INFOGRAFIS
Transparansi PAD Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik & Morale
© September 4, 2025



INFOGRAFIS
Tahun 2026, Pendapatan Daerah se-Riau Diproyeksikan Anjlok, Pemenuhan Layanan Dasar dan Ekonomi Masyarakat Terancam.
© September 3, 2025



INFOGRAFIS
Hari Anti Korupsi Dunia (HARKODIA) 2025
© Desember 9, 2025



INFOGRAFIS
Dukungan Anggaran dan Skema Pengelolaan Perhutanan Sosial Provinsi Riau
© Oktober 21, 2025

Buku dan Panduan



Pedoman untuk Mendorong Prinsip-Prinsip Kelestarian dan Berkelanjutan dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat

BUKU DAN PANDUAN

RENCANA AKSI DAERAH MENUJU KABUPATEN LESTARI

© Desember 17, 2025

TOOLS PEMANTAUAN
PENERAPAN SILEGDA DPRD
RIAU



BUKU DAN PANDUAN

TOOLS PEMANTAUAN PENERAPAN SILEGDA DPRD RIAU

© Februari 5, 2025

Laporan Penelitian



LAPORAN PENELITIAN

KAJIAN KETERBUKAAN INFORMASI HTI DI INDONESIA 2025

• Dokumentasi Kegiatan

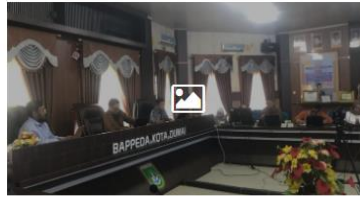




GALERI

FGD Tematik: Internalisasi Praktik Baik EFT/TAKE Ke Dalam RPJM 2025-2029 Dan Sinkronisasi Dengan Kebijakan Bengkalis Lestari

🕒 April 11, 2025 👁 15



GALERI

FGD Tematik ALAKE Dumai 2025-2029

🕒 April 10, 2025 👁 21



GALERI

Penyambutan Mahasiswa Magang Prodi Pendidikan Masyarakat UNRI di FITRA Riau:

🕒 Februari 25, 2025 👁 16



GALERI

Diseminasi Hasil Kajian Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Sektor Hutan Tanaman Industri (HTI)

🕒 November 6, 2025 👁 3



GALERI

Konsultasi Publik : Kajian Evaluasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Sektor HutanTanaman Industri

🕒 Oktober 24, 2025 👁 2



GALERI

FITRA Riau Apresiasi Lima Daerah di Riau Raih EFT Award Tingkat Nasional Tahun 2025



GALERI

FGD: PEMBAHASAN KONSEP DAN PENYUSUNAN PLATFORM SISTEM LEGISLASI